



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : PK.02.01.05/ 205 -Disdikbud

Tentang

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

Menimbang : 1. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
2. bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak (TK).
3. bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
4. bahwa sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
8. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : - Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.
- Surat Permohonan Perubahan Ijin Operasional dari Ketua Lembaga KOBER "Darussurur" dengan No. 421.1/015/PAUD DARUSSURUR/VII/2021 Pada Tanggal 2 Juli 2021.

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Subang
: PK.02.01.05/ 255 -Disdikbud
: 21 Juli 2021
: Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

SUSUNAN ORGANISASI KOBER "DARUSSURUR"

1. Pembina
 - Camat Blanakan
 - Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Blanakan
 - Penilik PAUD Kecamatan Blanakan
 - Kepala Desa Blanakan
2. Ketua
 - : H. Sopan Sopandi
3. Sekretaris
 - : M. Muzayyin
4. Bendahara
 - : Hj. Siti Hajar Mahmudiah Al Qosimi
5. Bidang
 - Pendidikan : Reni Faujiah
 - Keagamaan : Siti Khodijah
 - Kemitraan : Hj. Siti Saodah
 - Pengembangan KOBER : Rustini

Ditetapkan di : **SUBANG**
Pada Tanggal : 21 Juli 2021

Kepala



TATANG KOMARA, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650708 199103 1 010



NOTARIS DAN P.P.A.T
KASMAN HADIWIJAYA, S.H.

Jl. Ion Martasasmila No. 15 Pamenukan - Subang
Telp. (0260) 550408, Fax. (0260) 550271, Hp. 0811238812
Email : kasmanhadiwijayanoterisppat@yahoo.com

Turunan / salinan / Grosse

AKTA :PENDIRIAN YAYASAN.....

.....DARUSSURUR BLANAKAN.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TANGGAL :02-09-2018..... NOMOR :1.....

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

Nomor : 1,-

Pada hari ini, Senin tanggal 03-09-2018 (tiga September dua ribu delapan belas) pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia bagian Barat), -----

Menghadap dihadapan saya, KASMAN HADIWIJAYA Sarjana Hukum, Notaris -----
di Kabupaten Subang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Nyonya HJ. NURHAYATI, lahir di Subang pada tanggal 10-02-1976 (sepuluh Februari --
seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warganegara Indonesia, pekerjaan Mengurus --
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Kecamatan Blanakan, Desa ----
Blanakan, Dusun Tanjungsari, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 003, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3213135002760001, -----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai Rp 10.000.000,00 (sepuluh -
juta rupiah), -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ---
serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk -----
mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Yayasan ini bernama Yayasan DARUSSURUR BLANAKAN (selanjutnya dalam -----
anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat
di Dusun Tanjungsari, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Blanakan, -----
Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam ----
maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan ----



persetujuan Pembina. -----

MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

1. Sosial: -----

2. Kemanusiaan: -----

3. Kengamaan: -----

KEGIATAN -----

Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Di bidang sosial menyelenggarakan : -----

a. Lembaga pendidikan formal dan nonformal; -----

b. Panti asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda; -----

c. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium; -----

d. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan; -----

e. Studi banding; -----

2. Di bidang kemanusiaan : -----

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam; -----

b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; -----

c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan; -----

d. Memberikan perlindungan konsumen; -----

e. Melestarikan lingkungan hidup. -----

3. Di bidang Kengamaan : -----

a. Mendirikan sarana ibadah; -----

b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah; -----

- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak, dan sedekah;
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;
- e. Melaksanakan syiar keagamaan;
- f. Studi banding keagamaan;

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu.

KEKAYAAN

Pasal 5

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga

diperoleh dari :

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;

b. wakaf;

c. hibah;

d. hibah wasiat; dan

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan

Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

a. Pembina;

b. Pengurus;

c. Pengawas.

..... P E M B I N A

..... Pasal 7

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan ----
kepada Pengurus atau Pengawas.

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.

(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya ----
diangkat sebagai Ketua Pembina.

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri
Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai
mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.

(6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka -
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat --
anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota -
Pengurus.

(7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

..... Pasal 8

(1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.

(2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina ----
tersebut :

a. meninggal dunia:

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam --

Pasal 7 ayat (7);

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----

e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan -----
pengadilan; -----

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku; -----

(3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota -----
Pengawas. -----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

(1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. -----

(2) Kewenangan Pembina meliputi : -----

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----

b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan -----

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan; -----

f. pengesahan laporan tahunan; -----

g. menunjuk dan menunjuk kembali liquidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang -----
diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

(1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam -----
waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana -----
dimaksud dalam pasal 12. -----

Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan --
tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota -----
Pengawas. -----

(2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat --
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

(3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. --

(4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan,
atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----

(5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil -
keputusan yang sah dan mengikat. -----

(6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau --
berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari
anggota Pembina yang hadir. -----

(7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam ----
Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

Pasal 11

(1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : ----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina; -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka --
dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan ----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling -----

lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----

c. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, ---

apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----

(2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka -----

keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara ---

yang sah. -----

(4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

(5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan -

1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ---

tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara -----

terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada -----

keberatan dari yang hadir; -----

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah -

suara yang dikeluarkan. -----

(6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan -

sekretaris rapat. -----

(7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita -

acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----

(8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, -----

dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua -----

anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis --

serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan ----

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----

- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) ---- bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----

- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----

- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau ----- sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk ---- tahun yang akan datang; -----
- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; -----

- (3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan ---- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13 -----

- (1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang ----- sekurang-kurangnya terdiri dari: -----

- a. seorang Ketua; -----
- b. seorang Sekretaris; dan -----
- c. seorang Bendahara. -----

- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya -----

diangkat sebagai Ketua Umum. -----

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya -
diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya -
diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- Pasal 14 -----

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu -
melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengelolaan
Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara -----
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

(2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) ----
tahun dan dapat diangkat kembali. -----

(3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan: -----
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; ---
dan -----
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -----

(4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga) -----
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk -
mengisi kekosongan itu. -----

(5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 --
(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan
rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh -----
Pengawas. -----

(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara ----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

(1) meninggal dunia; -----

(2) mengundurkan diri; -----

(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----

(4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----

(5) masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

(1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----

(2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----

(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----

(4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal -----

dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil ---
uang Yayasan di Bank; -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha-
baik di dalam maupun di luar negeri; -----

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama -----
Yayasan; -----

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta -----
mengagunkan/membehani kekayaan Yayasan; -----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, --
Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang -
perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus -----
mendapat persetujuan dari Pembina. -----

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

(1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----

(2) membebanikan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----

(3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, -----

Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang -
perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -

----- Pasal 18 -----

(1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah Sekretaris Umum berwenang bertindak untuk -

dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhutangan karena sebab apapun juga, hal -----

tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya -----
bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau --
berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak -
ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

(3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan --
kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----

(4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang
Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum --
berlaku juga baginya. -----

(5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang -
Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum -
berlaku juga baginya. -----

(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina -----
melalui Rapat Pembina. -----

(7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seseorang atau lebih wakil atau ---
kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

(1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan ----
berdasarkan keputusan rapat Pengurus. -----

(2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang-perseorangan ----
yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau -----
dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara -
berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ---
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

- (3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat -----
Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak ---
mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- (4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. -----
- (5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya -----
ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20 -----

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau ---
apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, ---
maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas ---
nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan -----
seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis
dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina. -----
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. ---
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung,
atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum --
rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ---
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara ---
rapat. -----
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan

persetujuan Pembina.

Pasal 22

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pengurus kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka.

- kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara -----
yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan -----
1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara -----
Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus. -----
dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua -----
anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis -----
serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan -----
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

PENGAWAS -----

Pasal 24 -----

- (1) Pengawas adalah Organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi -----
nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya -----
dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

Pasal 25 -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu -----
melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan -----
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara -----
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak -----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) ---
tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga -----
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk -
mengisi kekosongan itu. -----
- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dengan jangka waktu paling lama 30 --
(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan
rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh -----
Pengurus. -----
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara ----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling ----
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas -----
Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri --
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. --

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

- (1) meninggal dunia; -----
- (2) mengundurkan diri; -----
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan
hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
- (5) masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas -----
pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pengawas. -----
- (3) Pengawas berwenang : -----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuhan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, ----
apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang -----
bersangkutan disertai alasannya. -----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, -
Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota -----
Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana --
dimaksud dengan ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7)

dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan --
menjabat kembali jabatannya semula. -----

(10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas --
diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

(1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis --
dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----

(2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. --

(3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau --
melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat --
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

(4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

(5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan -----
Yayasan. -----

(6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia
dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 29 -----

(1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan
dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----

(3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat -----
Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----

(4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas. -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka ----

dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan -----

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat -----

21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, ----

apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

Pasal 30 -----

(1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka -----

keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara ----

yang sah. -----

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda -----

tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, ---

kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ---

yang dikeluarkan. -----

(6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan -----

1 (satu) orang anggota Pengrus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara --

Rapat dibuat dengan akta notaris. -----

(8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, -----

dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas -

memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan -----

menandatangani usul tersebut.

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka -----
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 -
(dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya -----
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota -----
Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah -----
terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi ---
dalam rapat. -----
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita -
Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah -----
tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua -----
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas -----
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan -----
menandatangani usul tersebut. -----
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai -
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Paral 34

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga
puluh satu) Desember. -----
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ---
Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember -----

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan -- setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan. -----
- (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan. -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat ----- Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina. -----
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka ----- keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari ----- seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan --- pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari -----

seluruh Pembina. -----

- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara -----
terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

Pasal 37 -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa -----
Indonesia. -----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan. --
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, --
harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia. -----
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia. -----
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, --
kecuali atas persetujuan kurator. -----

PENGGAJUNGAN -----

Pasal 38 -----

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih -----
Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri --
menjadi bubar. -----
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan --
memperhatikan : -----
- a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau-
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang -----
bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----

(3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -----

----- Pasal 39 -----

(1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ---
yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan -----
disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang ---
hadir. -----

(2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan ---
menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -----

(3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam ---
rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan ---
diri dan yang akan menerima penggabungan. -----

(4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing
Yayasan. -----

(5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan -
yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. -----

(6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam -
surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -
penggabungan selesai dilakukan. -----

(7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang -----
memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta -----
perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan
Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

(1) Yayasan bubar karena : -----
a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran --

Dasar berakhir; -----

b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak -----
tercapai; -----

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----

1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----

2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----

3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan ---
pailit dicabut. -----

(2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, -----

Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----

(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

----- Pasal 41 -----

(1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali ---
untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

(2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan
frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. -----

(3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk --
likuidator. -----

(4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di -
bidang kepailitan. -----

(5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, -----
pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan -----
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----

(6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan -
yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal -----
penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam --

surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----

(7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

(8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----

(9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat --

(1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan -----
Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas ---
Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

a. Pembina : Nyonya HJ. NURHAYATI, tersebut. -----

b. Pengurus : -----

Ketua : Tuan H. NATA SUPARJO, lahir di Purwakarta pada tanggal -----
17-08-1952 (tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus lima -----
puluh dua), Warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Kecamatan Blanakan, ---
Desa Blanakan, Dusun Tanjung Sari, Rukun Warga 001, Rukun --
Tetangga 004, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3213131708520001. -----

Sekretaris : Tuan H. SOPAN SOPANDI, lahir di Karawang pada tanggal -----
10-01-1983 (sepuluh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh--
tiga), Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat --
tinggal di Kabupaten Subang, Kecamatan Blanakan, Desa -----
Blanakan, Dusun Tanjungsari, Rukun Warga 001, Rukun -----
Tetangga 003, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3213131001830003. -----

Bendahara : Nyonya HJ. SITI HAJAR MAHMLUDIAH AL. QOSIMI, lahir -----
di Bogor pada tanggal 22-06-1989 (dua puluh dua Juni seribu -----
sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warganegara Indonesia, -
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal -----
di Kabupaten Subang, Kecamatan Blanakan, Desa Blanakan, -----
Dusun Tanjungsari, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 003, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3213136206890002, -----

c. Pengawas

: Nyonya HJ. SITI SAODAH, lahir di Karawang pada tanggal -----
03-05-1962 (tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), -----
Warganegara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Kecamatan Blanakan, -----
Desa Blanakan, Dusun Tanjung Sari, Rukun Warga 001, Rukun ---
Tetangga 004, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3213134305620003. -----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota -----

Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan ---
harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini---
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----
Pengurus Yayasan dan

hak bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan --
ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas --
Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan ----
dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk -----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua ---
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -----
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Diselesaikan di Subang, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian permulaan akta ini -----
dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya NIA ROHATIN, dilahirkan di Subang pada tanggal 17-07-1985 (tujuh belas Juli
seribu sembilan ratus delapan puluh lima), bertempat tinggal di Kabupaten Subang, -----
Kecamatan Pamanukan, Desa Mulyasari, Dusun Baru, Rukun Warga 13, Rukun -----

Tetangga 03. -----

2. Nyonya SUSI PATMAWATI, lahir di Subang pada tanggal 10-11-1995 (sepuluh -----
November seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), bertempat tinggal di Kabupaten -----
Subang, Kecamatan Tambakdahan, Desa Bojonegara, Kampung Pintu, Rukun Warga 03,
Rukun Tetangga 08. -----

Kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, Warganegara Indonesia, sebagai saksi-saksi. -----
Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka --
pada ketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani. -----
Dibuat dengan tanpa gantian, coretan maupun tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani -----
dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

